

HUKUM DAN POLITIK DI CHINA (KAJIAN RELASI KEKUASAAN PARTAI TERHADAP PROFESI HUKUM)

Isharyanto

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Kentingan, Jl. Ir. Sutami No.36A, Jebres, Kec. Jebres,
Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Abstract

This article discusses the legal and political issues in the People's Republic of China by examining interactions between the legal profession which have a profound but undisputed impact on daily law enforcement and broader state-community relations. This doctrinal research uses conceptual approach. The results shows that since the late 1970s, China has experienced significant political, economic, social and cultural changes. The legal system had restoration but retained the character of state hostility towards this entity. Courts, prosecutors and the police are government apparatus controlled by the party as the highest authority in formulating and control policy. The lawyer's profession has been privatized, but with the lack in the legal education system, issues of attorney's capacity have surfaced. Lawyers are permitted to join professional associations, but party control remains strong. Critical and active lawyers are likely to have a wide-ranging impact in the future on the existence of judges, prosecutors and police, even including the party's authoritarians themselves.

Key words: lawyer, China, law and politics.

Abstrak

Tulisan ini membahas masalah hukum dan politik di Republik Rakyat China dengan menguji interaksi di antara profesi hukum yang memiliki dampak mendalam namun belum tergarap pada penegakan hukum sehari-hari dan hubungan negara-masyarakat yang lebih luas. Penelitian doktrinal ini menggunakan pendekatan konseptual. Hasilnya, sejak akhir 1970-an, China telah mengalami perubahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara signifikan. Hukum mengalami restorasi tetapi mempertahankan watak permusuhan negara terhadap entitas ini. Pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian merupakan aparatur pemerintah yang dikendalikan partai sebagai otoritas tertinggi perumus dan pengawas kebijakan. Profesi pengacara telah diprivatisasi, namun dengan kesenjangan sistem pendidikan hukum, persoalan kapasitas pengacara mengemuka. Pengacara diperbolehkan bergabung dalam perhimpunan profesi, namun kendali partai tetap kuat. Pengacara yang kritis dan aktif akan memberikan dampak luas di masa depan terhadap keberadaan para hakim, jaksa, dan polisi, bahkan termasuk kepada otoritarian partai itu sendiri.

Kata Kunci: pengacara, China, hukum dan politik.

Latar Belakang

Berbicara tentang relasi antara hukum dan politik adalah berbicara bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu.¹ Dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang² dan nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan.³ Dengan demikian idealnya hukum dibuat dengan mempertimbangkan adanya kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan tersebut. Dengan ciri-ciri mengandung perintah dan larangan, menuntut kepatuhan dan adanya sanksi, maka hukum yang berjalan akan menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat.⁴

Hubungan hukum dan politik seperti itu juga tercermin dalam realita di Republik Rakyat China, yang didirikan sejak 1949, di bawah payung administratif “*political legal system*” (zheng faxitong 政法系统).⁵ Sistem ini berlangsung hingga abad ke-21 dan mampu mempertahankan tidak hanya kemajuan ekonomi dan stabilitas tetapi juga

legitimasi Partai Komunis China. Tulisan ini membahas masalah hukum dan politik di China dengan pendekatan internasional untuk menguji interaksi di antara lembaga-lembaga hukum-politik yang memiliki dampak mendalam namun belum tergarap pada penegakan hukum sehari-hari dan hubungan negara-masyarakat yang lebih luas. Walaupun pendekatan relasional adalah perspektif teoretis yang meningkat dalam sosiologi dan disiplin terkait, namun belum diperluas dalam kajian politik atau hukum China. Berpikir tentang hukum dan politik secara relasional berarti menggantikan perspektif kausal yang dominan dalam ilmu sosial dengan perspektif relasional yang memandang lembaga-lembaga hukum dan politik bukan sebagai “hal-hal”⁶, tetapi sebagai “hubungan yang dinamis dan terbuka.”⁷

Sejak akhir 1970-an, Republik Rakyat China (RRC) telah mengalami perubahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara signifikan.⁸ Salah satu capaian adalah kesadaran hukum yang meningkat hukum

-
- 1 Merdi Hajiji, “Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 2, No. 3, (2013): 361–73.
 - 2 Abdus Salam, “Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia,” *Mazahib* Vol. 15, No. 2, (2015): 120–31.
 - 3 Hikmahanto Juwana, “Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia” (Kuliah Hukum Pembangunan, Kampus UII, Yogyakarta, 2013).
 - 4 Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011); E. Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, (Jakarta: Kompas Gramedia Nusantara, 2007).
 - 5 Juan Wang dan Sida Liu, “Ordering Power under the Party: A Relational Approach to Law and Politics in China,” *Asian Journal of Law and Society* 6 (2019): 1–18.
 - 6 Pierre Bourdieu, “The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field,” *Hastings Law Journal* 38 (1987): 805–53.
 - 7 Mustafa Emirbayer, “Manifesto for a Relational Sociology,” *American Journal of Sociology* 103, (1997): 281–317.
 - 8 Donald C. Clarke, “New Approaches to the Study of Political Order in China,” *Modern China* Vol. 36, No. 1, (2010): 87–99.

dan penyelesaian perkara pengadilan.⁹ Akan tetapi, pengadilan terbukti tidak siap menghadapi bermacam-macam perkara¹⁰, memicu perdebatan reformasi peradilan.¹¹ Untuk mencapai tujuan konstitusional guna membangun negara hukum sosialis, sistem peradilan yang modern sangat diperlukan.¹² Mereformasi peradilan bukan hanya tema dalam studi tentang kebijaksanaan agama, tetapi terkait erat dengan konsep supremasi hukum itu sendiri.¹³ Selain itu, ketika China mengalami perkembangan dan perubahan yang signifikan, sistem peradilan--yang bertugas menjaga keadilan sosial--harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang.¹⁴ Oleh karena itu, meskipun jalan reformasi mungkin saja tidak tepat, tidak ada pilihan lain selain terus maju, dilengkapi dengan pemahaman bahwa reformasi peradilan adalah tugas jangka panjang dan bukan tindakan tunggal yang dengan mudah dapat digambarkan dan didefinisikan.¹⁵

Seperti teori lapangan dan teori ekologi dalam sosiologi¹⁶, usaha menemukan aktor dan institusi politik dan hukum dalam ruang sosial (misalnya sistem politik-hukum China) dan memeriksa bagaimana masing-masing aktor atau institusi (polisi, pengadilan, pengacara, dan sebagainya), didasari oleh posisi spasial serta interaksi timbal balik mereka.¹⁷

Politik domestik China ditandai oleh tingkat fragmentasi yang tinggi baik secara horizontal maupun vertikal. Berbagai cara sejauh mana lembaga-lembaga hukum-politik dibentuk dan dibatasi oleh masing-masing lembaga dan lembaga lainnya (misal Partai politik) memerlukan analisis spasial dan interaksional dari hubungan timbal balik mereka. Sistem hukum-politik China menguraikan institusi hukum utama: polisi, kejaksaan, pengadilan, biro kehakiman, dan komite hukum partai.¹⁸ Dalam hal desain kelembagaan formal, pengadilan dan kejaksaan adalah organ yudisial. Polisi dan biro kehakiman merupakan bagian dari kabinet.

-
- 9 Philip C. C. Huang, "Court Mediation in China, Past and Present," *Modern China* Vol. 32, No. 3, (2006): 275-314.
- 10 Susan Trevaskes, "Propagating Justice through Court and Prosecution Work in China," *Modern China* Vol. 43, No. 2, (2017): 156-185.
- 11 Susan Trevaskes, "Political Ideology, the Party, and Politicking: Justice System Reform in China," *Modern China* Vol. 37, No. 3. (2011): 315-44.
- 12 Xin Chunying, "What kind of judicial power does China need?," *International Journal of Constitutional Law* Vol. 1, No. 1, (2003): 58-78.
- 13 Paul R. Katz, "Ritual? What Ritual? Secularization in the Study of Chinese Legal History, from Colonial Encounters to Modern Scholarship," *Social Compass* Vol. 56, No. 3, (2009): 328-44.
- 14 Zhuhao Wang dan David R. A. Caruso, "Is an Oral-Evidence Based Criminal Trial Possible in China?," *The International Journal of Evidence & Proof* Vol. 21, No. 1-2, (2017): 52-68.
- 15 Li Ying Li dan Yue Ma, "Adjudication and Legal Reforms in Contemporary China," *Contemporary Criminal Justice* 25, No. 1, (2010): 36-52.
- 16 Pierre Bourdieu dan Loïc Wacquant, *An Invitation to Reflexive Sociology* (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1992).
- 17 Sida Liu dan Hongqi Wu, "The Ecology of Organizational Growth: Chinese Law Firms in the Age of Globalization," *American Journal of Sociology* Vol. 122, (2016): 798-837.
- 18 Kenneth Lieberthal dan David M. Lampton, *Bureaucracy, Politics, and Decision Making in Post-Mao China* (Berkeley: University of California Press, 1992).

Komite hukum adalah organ partai yang mengoordinasikan 4 (empat) lembaga negara lainnya. Dengan demikian, dinamika internal sistem hukum-politik terkait erat dengan hubungan antara partai dan pemerintah, serta antara peradilan dan cabang eksekutif.

Pendekatan relasional kami terhadap lembaga-lembaga politik dan hukum menekankan perubahan hubungan di antara 5 (lima) lembaga politik-hukum utama di China, terutama posisi spasial dan interaksi timbal balik mereka. Kajian yang telah ada terutama fokus pada satu atau dua lembaga individu dalam sistem hukum-politik, seperti pengadilan, polisi, atau profesi hukum.¹⁹ Namun, lembaga hukum-politik China adalah aktor yang saling bergantung dalam ruang sosial sistem hukum-politik. Agar pengadilan dapat menggunakan kekuasaan, lembaga-lembaga hukum-politik lainnya harus dikoordinasikan dan konflik sering muncul. Pendekatan relasional memulai analisis dari prinsip-prinsip umum yang mengatur hubungan antara politik dan hukum China, dan kemudian memeriksa bagaimana prinsip-prinsip itu terwujud dalam interaksi tertentu di antara 5 (lima) lembaga hukum utama tadi.

Dalam artikel ini penulis pertama-tama menempatkan hukum dalam tatanan politik dengan memeriksa pandangan dan praktik elit PKC tentang peran hukum dalam pemerintahan

dan kehidupan partai. Pandangan dan praktik ini membentuk desain kelembagaan politik dan hukum dan mengontekstualisasikan operasi harian aktor individu. Pada saat ini, berbagai lembaga diharapkan memperluas otoritas yang dimiliki, seperti banyak dikaji oleh literatur tentang rasionalitas organisasi.²⁰ Pada bagian selanjutnya, akan dijelaskan desain kelembagaan dan pengembangan hubungan polisi, kejaksaan, pengadilan, dan profesi pengacara.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan studi pustaka sebagai tumpuan. Penelitian doktrinal merupakan penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap isu kategori hukum tertentu. Pendekatan konsep menjadi pilihan untuk memecahkan rumusan masalah penelitian.

Pembahasan

Arsitektur Peradilan China

Sepanjang sejarah kekaisaran, fungsi peradilan dan eksekutif pemerintah dijalankan bersama oleh para hakim di sebagian besar wilayah China.²¹ Spesialisasi fungsi yudisial dipraktikkan, pada tingkat yang berbeda-beda, hanya di tingkat nasional. Situasi ini tetap berlangsung sampai awal abad ke-20.

19 Susan Travekas, "Severe and Swift Justice in China," *British Journal of Criminology* 34, (2006): 23–41.

20 Marshall W. Meyer, "The Growth of Public and Private Bureaucracies," *Theory and Society* 16, (1987): 215–35.

21 Ling Li, "The Chinese Communist Party and People's Courts: Judicial Dependence in China," *The American Journal Of Comparative Law* 64, (2016): 36–74.

Selama Pemerintahan Beiyang Yuan Shikai, reformasi peradilan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip supremasi hukum, independensi peradilan, dan *due process of law*, yang menunjukkan kecenderungan modernisasi sistem peradilan.²² Ketika KMT mengambil alih kekuasaan, ia memperkenalkan sistem politik satu partai, di mana Pemerintahan Nasional Nanjing (Pemerintah Nasional) dibentuk. Karena KMT mempertimbangkan pemerintahan satu partai sebagai pemerintahan sementara menuju pemerintahan konstitusional yang akan dipilih melalui pemilu²³, ia melanjutkan reformasi peradilan yang dimulai pada era Beiyang dan melestarikan prinsip-prinsip supremasi hukum, independensi peradilan, dan *due process of law*, terlepas kekurangan atas pembaruan ini karena kendala politik dalam pemerintahan satu partai.²⁴ Bersamaan dengan itu, di “daerah perbatasan” yang dikontrol partai, lembaga-lembaga seperti pengadilan juga dibentuk untuk memberikan penyelesaian bagi perselisihan sipil dan, yang lebih penting, untuk melakukan pengadilan pidana. Tidak seperti di wilayah yang dikuasai KMT, pengadilan dalam daerah perbatasan

ini tidak terpisah dari cabang eksekutif.²⁵ Pemerintah dapat menetapkan undang-undang dan secara langsung terlibat hukum acara melalui penuntutan dan penjatuhan pidana. Pada akhir tahun 1940-an keseimbangan kekuasaan bergeser ketika Partai Komunis China (PKC) mulai mengambilalih hukum dan pemerintahan.²⁶ Pada bulan Februari 1949, PKC mengeluarkan instruksi (dikenal sebagai “Instruksi Februari”) yang menyingkirkan semua 6 (enam) kodifikasi hukum yang telah dipersiapkan oleh KMT. Pada tahun 1950, Dewan Negara yang baru dibentuk, mengumumkan bahwa pengadilan merupakan instrumen penting untuk melindungi “kekuatan rakyat”, sama dengan tentara dan polisi.²⁷

Kombinasi “independensi peradilan” dan otoritas partai atas negara telah memiliki banyak konsekuensi sehubungan dengan otoritas pengadilan China.²⁸ Yang *pertama* dan juga paling jelas adalah pengadilan secara efektif tidak dapat mengontrol kegiatan partai. Sebagai gantinya, partai tunduk pada pengaturan diri secara *top down*. Yang *kedua*, kapasitas pengadilan untuk menundukkan institusi atau individu, dibatasi oleh hubungan

22 Xiaoqun Xu, *Trial of Modernity: Judicial Reform in Early Twentieth-Century China, 1901-1937* (Stanford, CA: Stanford University Press, 2008), bb. 4.

23 *Ibid.*

24 *Ibid.*

25 Nicholas C. Howson, “China’s Judicial System and Judicial Reform,” *The Law Quadrangle* 54, No. 1 (2011): 62–64.

26 Kjeld Erik Brødsgaard, “Politics and Business Group Formation in China: The Party in Control?,” *The China Quarterly* 211, (2012): 624–48.

27 Frank N. Pieke, “The Communist Party and Social Management in China,” *China Information* 26, no. 2, (2012): 149–65.

28 Stanley Lubman, “Looking for Law in China,” *Columbia Journal of Asian Law* Vol. 20, no. 1, (2006): 1–92.

kekuasaan antara pengadilan dan subjek yang terlibat. Partai menentukan dan mengelola rantai komando, demi menjaga kekuasaan otoriter partai atas negara. Setiap institusi negara diberi peringkat, termasuk pengadilan. Ruang lingkup otoritas pengadilan mana pun atas suatu subjek adalah sepadan dengan peringkat subjek tersebut *vis a vis* pengadilan. Sifat relatif otoritas peradilan ini juga menjelaskan mengapa pengadilan di satu sisi, terlalu kuat dan mampu merusak dan bahkan melakukan tindakan sebagai pemangsa, dan di sisi lain, sepenuhnya kehilangan kekuasaan, menghindari pemeriksaan perkara yang melibatkan institusi dan individu berpengaruh.²⁹

Dalam narasi di atas, perhatian harus ditempatkan pada anteseden historis terbaik untuk program reformasi China tersebut, yaitu pengalaman Meiji di Jepang. Meskipun konstitusi Meiji memiliki semacam *bill of rights*, namun bukan sebagai hak-hak dasar manusia, akan tetapi hak-hak yang lahir karena kemurahan hati kaisar. Para perumus konstitusi Meiji percaya bahwa konstitusi modern memerlukan semacam deklarasi hak, tetapi tidak perlu menggoyahkan dominasi negara.³⁰ Seperti para pemimpin China hari ini, para reformis Meiji berusaha untuk

meningkatkan kekuatan negara melalui reformasi hukum. Fokus terbesar adalah independensi pengadilan, yang sepaket dengan modernisasi industri dan militer. Sistem itu berwatak oligarki, meskipun tentu saja PKC jauh lebih substantif dibandingkan model Meiji yang berwatak personal.³¹

Reformasi peradilan di China memiliki kedalaman yang tidak dapat dibandingkan dengan negara lain mana pun. Dalam hal kedalaman, China sedang mencoba untuk mereformasi sistem yang dirancang untuk mendukung ekonomi terencana dengan sentralisasi eksekutif, dan mengubahnya menjadi sistem peradilan modern supaya selaras dengan ekonomi pasar sosialis sembari memperhatikan norma-norma internasional.³² Dengan demikian, reformasi peradilan bersifat komprehensif, mencakup dimensi teknis dan budaya. Tujuan ambisius ini dimainkan dengan latar belakang transisi sosial dan reformasi struktural politik.³³

Meskipun konstitusi secara teoritis membatasi kekuasaan negara dan melindungi sejumlah hak sebagaimana anjuran kaum liberal, ia tidak memiliki mekanisme yang berarti untuk penegakannya. Misalnya, meskipun Konstitusi melindungi kebebasan berkumpul dan berserikat, pemerintah

29 Xin He, "Why Did They Not Take the Disputes? Law, Power, Politics in the Decision-Making of Chinese Courts," *International Journal of Law in Context* 3, (2007): 203.

30 Norikazu Kawagishi, "The birth of judicial review in Japan," *International Journal of Constitutional Law* Vol. 5, No. 2, (2007): 308–331.

31 Meryll Dean, *Japanese Legal System: Text and Materials* (London: Cavendish Publishing, 1997).

32 Zou Keyuan, "Judicial Reform in China: Recent Developments and Future Prospects," *The International Lawyer* Vol. 36, no. 3, (2002): 1039–62.

33 Ji Weidong, "The Judicial Reform in China: The Status Quo and Future Directions," *Indiana Journal of Global Legal Studies* Vol. 20, No. 1, (2013): 185–220.

hampir tidak pernah memberikan izin untuk hal itu. Selain itu, sejauh ini hanya ada satu kasus penafsiran Konstitusi di pengadilan. Pada tahun 2001, Mahkamah Agung Rakyat memutuskan bahwa Qi Yuling akan menerima ganti rugi atas dugaan pelanggaran haknya atas pendidikan seperti yang diberikan oleh Konstitusi. Putusan ini merupakan pertama kali karena menjadikan ketentuan konstitusi dasar hukum dalam perumusan putusan pengadilan. Meskipun aplikasi ini dianggap sebagai “*China’s Marbury Case*” itu juga merupakan kasus terakhir di mana pengadilan menafsirkan ketentuan konstitusional.³⁴ Juga tidak ada mekanisme permanen untuk menguji undang-undang dan menyelesaikan konflik antar peraturan perundang-undangan. Tidak seperti di Barat, China tidak memiliki pengadilan konstitusional atau peradilan penafsir konstitusi, meskipun pengadilan memang memiliki kekuasaan untuk menguji perbuatan pemerintah tertentu.³⁵

Merujuk kepada Konstitusi China³⁶, Mahkamah Agung adalah organ peradilan tertinggi di negara itu. Ia menjadi puncak semua aktivitas litigasi, dan tidak ada upaya hukum setelah Mahkamah Agung mengambil putusan. Namun, sebagai badan pengawas

peradilan nasional, Kejaksaan Agung Rakyat memiliki kekuasaan yang mampu mengubah putusan Mahkamah Agung. Dalam hal ini, sistem serupa dengan bekas Uni Soviet, di mana kejaksaan dominan atas peradilan. Untuk alasan ini, supremasi kekuasaan kehakiman tidak sepenuhnya berfungsi.³⁷

Mahkamah Agung Rakyat dipimpin oleh seorang Ketua. Ketua saat ini adalah Zhou Qiang, dan diangkat pada tahun 2013 oleh Kongres Rakyat Nasional, dan tentu saja sudah diremondasikan oleh partai. Mahkamah menjalankan 4 (empat) fungsi: penafsiran undang-undang, penyelesaian perselisihan, membuat aturan, dan mengelola administrasi peradilan.³⁸ Mahkamah tidak memiliki fungsi melakukan pengujian undang-undang, meskipun dapat mengeluarkan interpretasi peradilan yang memiliki efek mengikat mirip dengan undang-undang. Selain interpretasi ini, Mahkamah juga dapat mengeluarkan “pertimbangan” dan “memberikan nasihat” ke pengadilan yang lebih rendah, tetapi dokumen-dokumen ini tidak memiliki efek mengikat dan sering bersifat sementara.³⁹ Mahkamah tidak banyak memeriksa perkara, tetapi beberapa perkara banding, dan beberapa kasus tingkat pertama, sebagian besar merupakan kasus

34 Robert J. Morris, “China’s Marbury: Qi Yuling v. Chen Xiaoyi – The Once and Future Trial of Both Education & Constitutionalization,” *Tsinghua China Law Review* Vol. 2, No. 2, (2010): 274–312.

35 Eric C. Ip, “Judicial Review in China: A Positive Political Economy Analysis,” *Review of Law & Economics* Vol. 8, No. 2, (2012): 331–66.

36 Pasal 129 Konstitusi China (2004).

37 Susan Trevaskes, “The Supreme People’s Court, the Suspended Death Sentence and the Politics of Penal Reform,” *The British Journal of Criminology* Vol. 53, No. 3, (2013): 482–99.

38 S. Finder, “Supreme People’s Court of the People’s Republic of China,” *Chinese Journal of International Law* Vol. 7, (1993): 145–224.

39 J. Grimheden, “Themis V. Xiezhi: Assessing Judicial Independence in the People’s Republic of China Under International Human Rights Law.” (Doctoral Thesis Lund University, 2004), hlm. 191.

komersial yang bernilai besar.⁴⁰ Dalam hal administrasi peradilan, Konstitusi menetapkan bahwa Mahkamah mengelola dan mengawasi pengadilan-pengadilan tingkat rendah, tetapi ia tidak mengendalikan penunjukan hakim dan pendanaan pengadilan-pengadilan tingkat rendah.⁴¹

Setiap pengadilan memiliki struktur internal yang sama⁴² yang dapat digambarkan sangat birokratis dan hierarkis.⁴³ Di puncak hierarki adalah Ketua yang memiliki kekuasaan besar atas pengadilan.⁴⁴ Ketua biasanya tidak memiliki pendidikan hukum dan latar belakang hukum, dan umumnya dianggap sebagai politisi karir yang mencapai posisinya sebagai Ketua setelah mencapai posisi tinggi dalam pemerintahan atau partai.⁴⁵ Kekuasaan dalam pengadilan turun dari Ketua, ke wakil Wakil Ketua, dan kemudian ketua kamar pengadilan.

Setiap pengadilan biasanya memiliki 3 (tiga) divisi: sipil, ekonomi, dan administrasi. Ajudikasi dalam pengadilan seringkali merupakan usaha kolektif, dan sebagian besar kasus diputuskan oleh majelis yang meliputi tiga hakim dengan hakim ketua di setiap panel. Selain itu, kasus-kasus pengadilan yang didefinisikan sebagai “penting” atau “sulit” biasanya disidangkan oleh “komite

ajudikasi” internal pengadilan. Susunan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan kepala setiap kamar. Putusan komite ini bersifat final dan tidak dapat ditentang oleh hakim lain di pengadilan.⁴⁶

Secara teknis, sistem pengadilan China terstruktur menjadi 4 (empat) tingkatan. Sesuai dengan sistem pemerintahan, ada ribuan pengadilan rakyat di tingkat kabupaten atau kabupaten (yang dikenal sebagai pengadilan rakyat), ratusan pengadilan madya di tingkat kota atau prefektur dalam provinsi, 31 pengadilan di tingkat provinsi, dan Mahkamah Agung Rakyat di tingkat nasional. Ada juga pengadilan khusus, seperti pengadilan militer dan pengadilan maritim. Pengadilan khusus ini memiliki yurisdiksi khusus atas jenis perselisihan tertentu. Misalnya, pengadilan maritim yang berlokasi di berbagai kota di kawasan utara menangani sengketa maritim, sementara pengadilan militer memeriksa semua sengketa yang berkaitan dengan personel tentara. Sehubungan dengan struktur internal mereka, setiap pengadilan terdiri dari sejumlah divisi (*ting*), yang mengelola kegiatan pra-persidangan, persidangan, dan pasca-persidangan untuk setiap kasus. Kecenderungan dalam beberapa tahun terakhir adalah memiliki divisi kerja

40 *Ibid.*

41 *Ibid.*, hlm. 192.

42 *Ibid.*, hlm. 194.

43 J. Zhong dan G. Yu, “Establishing the Truth on Facts: Has the Chinese Civil Process Achieved This Goal,” *Journal of Transnational Law & Policy* Vol. 13, No. 2, (2004): 393–446.

44 *Ibid.*

45 R. Lan, “Are Intellectual Property Litigants Treated Fairer in China’s Courts? An Empirical Study of Two Sample Courts?” (Indiana University Research Center for Chinese Politics and Business, 2012).

46 J. Zhong dan G. Yu, *loc.cit.*

yang lebih ramping di antara berbagai jenis sengketa perdata dan secara terpisah menangani sengketa perdata, komersial, dan kekayaan intelektual oleh kamar profesional. Perkara di pengadilan biasanya diperiksa oleh semua majelis yang terdiri atas 3 (tiga) hakim, kecuali dalam kasus kasus perdata sederhana dan kasus kriminal kecil, yang dapat diperiksa oleh hakim tunggal.

Sehubungan dengan hakim, sampai berlakunya Undang-Undang Jabatan Hakim pada tahun 1995, mereka tidak diperlakukan sebagai profesional hukum. Sebagai gantinya, mereka diperlakukan sebagai kader negara, dan sistem manajemen personalia yang berlaku untuk hakim sama dengan sistem yang berlaku untuk pejabat yang bekerja di departemen pemerintahan lainnya. Pada awal 1980-an, sekitar dua pertiga hakim China tidak memiliki gelar sarjana hukum, dan sepertiga dari mereka adalah tentara yang diberi tugas khusus. Oleh karena itu, pemberlakuan Undang-Undang Jabatan Hakim dipandang sebagai langkah besar dalam pelembagaan dan profesionalisasi hakim dan dalam penciptaan sistem manajemen personil untuk hakim yang sesuai dengan sifat profesi peradilan. Perubahan yang terkait adalah termasuk memperketat dan memperkenankan persyaratan-persyaratan dalam penunjukkan hakim. Diperkenalkan syarat antara lain bahwa para hakim adalah calon yang lolos ujian terpadu profesi hukum (termasuk yang

diperuntukkan bagi jaksa dan pengacara). Calon hakim dapat mengikuti seleksi manakala telah memiliki pengalaman antara 1-3 tahun bekerja di lingkungan peradilan. Calon dapat meliputi sarjana hukum maupun sarjana bidang lain. Para hakim yang telah bekerja sebelum berlaku undang-undang jabatan hakim diberi kesempatan untuk mengambil pendidikan sarjana hukum dengan supervise dari pengadilan lokal.

Meskipun standar rekrutmen hakim telah diperketat, pada umumnya diyakini bahwa pendidikan hakim tentang praktik hukum komersial tidak cukup. Sebagai contoh, hakim China memiliki pengetahuan terbatas tentang standar arbitrase komersial modern, apalagi praktik internasional. Kadang-kadang hakim lokal keliru dalam menerapkan aturan dan prinsip-prinsip hukum.⁴⁷ *Rule of law* yang berlaku sering diabaikan oleh hakim lokal China ketika mereka menentukan validitas kontrak terkait asing. Keahlian hukum terlalu rendah ini juga telah menyebabkan beberapa putusan arbitrase asing terlalu diabaikan atau ditolak penegakannya.

Masalah masa jabatan serta remunerasi (dibandingkan dengan pengacara) juga telah memperburuk keterampilan hakim komersial. Beberapa hakim telah melakukan korupsi, sementara yang lain telah meninggalkan jabatan mereka untuk praktik yang lebih menguntungkan di firma hukum besar. Kualifikasi hakim lokal juga tidak seimbang

47 Weixia Gu, "Judicial Review over Arbitration in China: Assessing the Extent of the Latest Pro-Arbitration Move by the Supreme People's Court in the People's Republic of China," *Wisconsin International Law Journal* Vol. 27, No. 2, (2009): 221.

di seluruh negara. Daerah yang berkembang dengan baik secara ekonomi menarik lebih banyak bakat peradilan, dan orang-orang ini memiliki keahlian untuk menangani kasus-kasus asing dan norma-norma serta praktik-praktik komersial internasional. Oleh karena itu, para hakim di wilayah pesisir lebih kompeten, dan mereka mengambil pendekatan liberal yang lebih baik dalam menafsirkan kontrak dan perjanjian. Sebaliknya, para hakim di daerah pedesaan tidak memiliki pengetahuan memadai untuk menangani kasus-kasus komersial yang rumit. Kualifikasi yang tidak seimbang dari para hakim juga mengarah pada ketidakpastian tentang penegakan hukum di berbagai wilayah. Ketidakseimbangan ini juga merupakan alasan mengapa Hong Kong enggan untuk mengajukan putusan arbitrase oleh pengadilan rakyat di Daratan China ketika mereka menandatangani perjanjian pada tahun 2000 tentang saling pengakuan dan penegakan penghargaan arbitrase. Jelas, beberapa pengadilan madya tidak pernah mengambil setiap kasus Hong Kong atau yang berhubungan dengan asing dan mereka juga tidak memiliki personel yudisial yang memenuhi syarat untuk menangani kasus-kasus semacam itu.

Mahkamah Agung Rakyat telah membuat interpretasi yudisial, yang mensyaratkan bahwa semua tingkatan pengadilan secara aktif menerima pengawasan dari Kongres Rakyat.⁴⁸ Dengan demikian, *check and balances* internal dalam sistem memungkinkan mekanisme kolaborasi otoritas kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.⁴⁹ Pola saling menilik dan mengimbangi ini membuat pengadilan bertindak sesuai dengan prinsip lokalitas, karena tanpa sistem peradilan yang didasarkan pada federalisme, pengawasan vertikal internal jauh lebih longgar.⁵⁰ Karakteristik ini menunjukkan keunikan desain kelembagaan sistem peradilan China.⁵¹

Di bawah kondisi ini, peran paradoks Mahkamah Agung menjadi terlihat. Misalnya, prinsip supremasi Kongres Rakyat menyerukan sistem peradilan pasif, yang harus menerapkan undang-undang tanpa wewenang untuk melakukan pengujian. Pada saat yang sama, pengawasan vertikal dalam sistem peradilan dan penghapusan orientasi lokal menuntut aktivisme peradilan.⁵² Dalam kasus tekanan eksternal yang luar biasa, peradilan harus melawan campur tangan karena sulit bagi Mahkamah Agung untuk meningkatkan perannya melalui kontrol

48 Yingmao Tang dan John Zhuang Liu, "Mass Publicity of Chinese Court Decisions: Market-Driven or Authoritarian Transparency?," *China Review* Vol. 19, No. 2, (2019): 15–40.

49 Cheng Li, "The Chinese Communist Party: Recruiting and Controlling the New Elites," *Journal of Current Chinese Affairs* Vol. 38, No. 3, (2009): 13–33.

50 John A. Donaldson, "China's administrative hierarchy: The balance of power and winners and losers within China's levels of government," dalam *Assessing the balance of power in central-local relations in China*, ed. oleh John A. Donaldson (Abingdon: Routledge, 2017).

51 Tang Zheng Sophia, "Effectiveness Of Exclusive Jurisdiction Clauses In The Chinese Courts—A Pragmatic Study," *The International and Comparative Law Quarterly* Vol. 61, No. 2, (2012): 459–84.

52 Cai Lidong dan Qi Yingcheng, "Judicial Governance of 'Fake Divorce' with Chinese Characteristics: Practical Rationality of the Chinese Courts in the Transitional Period," *China Review* Vol. 19, No. 2, (2019): 99–124.

personel dan keuangan. Akibatnya, Mahkamah Agung harus menggunakan cara lain untuk mengembangkan dan mengkonsolidasikan hubungan organik antara semua tingkat pengadilan.⁵³ Namun demikian, upaya-upaya semacam itu sering mengakibatkan hambatan internal dan campur tangan oleh pengadilan yang lebih tinggi, yang merugikan kontinuitas independensi peradilan dalam dimensi makro maupun mikro.⁵⁴

Di antara para ahli dan pengamat perkembangan hukum China, karakter terpolitisasi peradilan ini diakui secara luas dan jarang diperdebatkan. Namun, pada saat yang sama, penelitian terbaru menunjukkan bahwa, terlepas dari banyak kendala politik yang menghadang mereka, pengadilan juga menunjukkan otonomi yang cukup besar di tingkat nasional dan lokal. Untuk tingkat nasional, Taisu Zhang mengajukan argumen yang meyakinkan bahwa Mahkamah Agung (SPC) didorong bukan oleh Partai, tetapi oleh kepentingannya sendiri untuk mengejar reformasi hukum yang akan memperkuat posisi dan statusnya sendiri dalam struktur sosial politik.⁵⁵ Ruang non-politik untuk otonomi yudisial ini juga ada, di tingkat lokal, karena mayoritas kasus yang diproses oleh pengadilan-pengadilan ini adalah perselisihan non-politik atau tidak berurusan dengan

kepentingan partai.

Relasi Fungsional

Perjuangan menuju negara konstitusional di China telah menjadi tema abadi selama lebih dari satu abad. Eksperimen paling awal dapat ditelusuri pada reformasi konstitusi di akhir Dinasti Qing. Pada waktu itu, para reformis moderat mengikuti jejak Jepang yang mendirikan monarki konstitusional, tetapi segera gagal setelah revolusi pembuatan bir. Kemudian di Era Republik, datang berbagai upaya mendirikan negara konstitusional, tetapi tidak ada yang berhasil, mengingat sering terjadi pertikaian antara panglima perang. Pemerintah KMT di bawah Chiang Kai-shek juga tidak mencapai banyak keberhasilan setelah unifikasi. Sebuah rancangan konstitusi pernah dipersiapkan pada 1936, akan tetapi referendum tidak dapat dilaksanakan akibat invasi Jepang.⁵⁶ Sejak saat itu, China tetap menjadi negara partai tunggal yang otoriter selama satu dekade. Meskipun ada konstitusi, hak-hak warga negara sebagian besar ditangguhkan, dan KMT terkenal karena taktik teror terhadap tersangka komunis dan lawan politik.

Sebagai tanggapan, kaum Komunis, yang berusaha meningkatkan popularitas mereka, mengambil keuntungan dari Front

53 John L. Thornton, "Long Time Coming: The Prospects for Democracy in China," *Foreign Affairs* Vol. 87, No. 1, (2008): 2–22.

54 Benjamin L. Liebman, "China's Courts: Restricted Reform," *The China Quarterly* No. 191, (2007): 620–38.

55 Taisu Zhang, "The Pragmatic Court: Reinterpreting the Supreme People's Court of China," *Columbia Journal of Asian Law* 25, (2012): 1–61.

56 Xiaohong Xiao-Planes, "Of Constitutions and Constitutionalism: Trying to Build a New Political Order in China, 1908-1949," dalam *Building Constitutionalism in China*, ed. oleh Stéphanie Balme dan Michael W. Dowdle (New York: Palgrave Macmillan, 2009).

Bersatu Kedua untuk menuntut pemerintahan konstitusional. Pada bulan Februari 1940, Mao Zedong berbicara pada upacara pembukaan Asosiasi Yan'an untuk Promosi Pemerintahan Konstitusional. Dukungan komunis untuk pemerintahan konstitusional ternyata menjadi strategi begitu Partai merebut kekuasaan pada tahun 1949. Negara baru, RRC, mengeluarkan konstitusi yang kuat, tetapi bukan pemerintah konstitusional yang dijanjikan. Tiga versi Konstitusi sebelumnya, yang diberlakukan pada tahun 1954, 1975, dan 1978, tidak hanya gagal mengendalikan pembengkakan negara partai tunggal tetapi juga mengabaikan hak-hak warga negara yang telah diabadikan dalam konstitusi.⁵⁷ Masalahnya, adalah ketimpangan dalam implementasi.

Perkembangan institusional dari aparat politik-hukum Partai sejak 1949 telah menjadi proses pergeseran yang konstan, dalam hal nama, struktur, dan fungsinya. Aparat hukum-politik Partai yang pertama adalah kelompok-partai yang berada di bawah Komite Hukum-Politik Dewan Negara yang dibentuk pada tahun 1949. Secara tegas, kelompok-partai bukanlah "institusi yang dipilih", tetapi hanya "pos terdepan" yang dikirim oleh Partai untuk mewakili kepentingan Partai dalam komite. Mandat komite termasuk: untuk mengarahkan, mengatur, memeriksa, dan memeriksa pekerjaan kementerian urusan sipil, hukum, dan keamanan publik. Selain itu, karena negara ketika itu masih dalam masa

pertumbuhan, Komite Politik-Hukum Dewan Negara juga diberi mandat untuk membentuk badan-badan negara dan melakukan beberapa layanan sipil, seperti memberikan tunjangan dan bantuan veteran. Kemudian, pada tahun 1954, Konstitusi memisahkan kekuasaan legislatif, eksekutif, kejaksaan, dan kehakiman. Di bawah struktur negara partai yang baru ini terdapat komite di bawah Dewan Negara untuk mengoordinasikan urusan politik-hukum. Dalam perkembangan selanjutnya, Partai membentuk Komite Hukum Partai Pusat di bawah Komite Partai Pusat. Komite Hukum ini diberi mandat untuk melakukan penugasan Komite Partai Sentral, untuk meninjau prinsip-prinsip dan kebijakan Partai tentang urusan hukum, untuk meninjau (pengaturan dan kegiatan kelembagaan) mengenai pembagian kerja, dan memeriksa dan menyeimbangkan antara lembaga-lembaga politik hukum.

Selama Revolusi Kebudayaan, sebagai institusi Partai dibongkar. Seluruh sistem hukum negara tetap lumpuh sampai akhir Revolusi Kebudayaan, ketika kegiatan pengadilan secara bertahap dipulihkan. Sebagai gantinya dibentuk Komite Politik-Hukum Partai Pusat. Selama tahun 1980-an, ketika tatanan politik dipulihkan dan reformasi ekonomi dimulai, Komite ini ditunjuk sebagai divisi permanen dari Partai. Sepanjang tahun 1980-an, personel Komite di seluruh negeri sebagian besar terlibat dalam kampanye

57 Zhang Qianfan, "A Constitution without Constitutionalism? The Paths of Constitutional Developments in China," *International Journal of Constitutional Law* 8, no. 4, (2010): 950–76.

“pemogokan keras” anti-kejahatan, di mana kemudian yang bersangkutan diproses tanpa memperhatikan hukum acara pidana dan hukuman berat diterapkan pada terdakwa. Sementara itu, ketika Partai meluncurkan reformasi ekonomi, bersamaan dengan itu reformasi untuk memisahkan Partai dan negara juga dipercepat. Pada tahun 1988, pada puncak reformasi, Partai memutuskan untuk mengurangi administrasi Partai dan membubarkan departemen dan divisi Partai yang memiliki lembaga negara terkait yang melakukan fungsi yang sama. Komite pada akhirnya dibubarkan pada 1988.

Segera sesudah itu, sebuah komite kecil hukum-politik dibentuk dan dipimpin oleh salah seorang elit biro partai. Komite ini kemudian menjadi salah satu elit partai yang berkuasa sepanjang 1980-an. Komite ini menyusun kebijakan nasional walaupun tidak memperoleh status dalam piagam partai. Ini serupa dengan komite-komite kecil lain di dalam unsur partai yang berkuasa dalam bidang masing-masing. Susunan keanggotaan komite dilengkapi dari pejabat kunci partai dan pejabat negara yang berwenang dalam merumuskan kebijakan hukum. Pembentukan komite kecil tersebut bukan berarti melonggarkan peran partai dalam pemerintahan tetapi tidak lebih hanyalah sebagai pendekatan yang berbeda dalam cara partai untuk meintervensi eksekutif. Beberapa pemimpin Partai terlalu sibuk mengganggu operasi lembaga peradilan dan beberapa terlalu takut untuk mengklaim otoritas. Namun setelah kisruh politik 1989,

dominasi partai dalam merumuskan haluan negara diperketat kembali dan komite kecil itu dibubarkan. Sebuah Komite Sentral Politik-Hukum kembali dibentuk. Komite baru ini berkomitmen untuk mengarahkan dan merumuskan kebijakan hukum secara makro. Pada dekade 1990-an, kekuasaan komite baru ini semakin besar karena digabung fungsinya dengan Komite Pelayanan Ketertiban Sipil Pusat. Komite secara struktural diperkuat dan menjadi komponen mandiri dari aparat Partai, dengan kantor-kantor yang didirikan di tingkat lokal dari provinsi hingga tingkat kabupaten. Kepala komite di tingkat lokal ini sejak itu telah diberikan keanggotaan dalam komite setempat.

Pada tahun 2003, Komite Reformasi Peradilan dibentuk. Dibandingkan dengan Komite Politik-Hukum, komite ini terutama adalah untuk mengkoordinasikan dan melakukan pemeriksaan rutin terhadap institusi-institusi hukum. Komite ini juga memediasi koordinasi dengan lembaga-lembaga negara lain. Sempat dikritik karena mengalami skandal kepemimpinan yang terlibat korupsi, komite kecil tetap aktif, diawasi langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai dan saat ini memimpin reformasi kelembagaan peradilan yang paling luas sejak sistem peradilan dipulihkan pada awal 1980-an.

Selain itu, sehubungan dengan kasus-kasus pidana, prinsip-prinsip *check and balances* terbagi diantara kekuasaan otoritas keamanan publik, kejaksaan, dan pengadilan

rakyat. Tampaknya ketiga organ itu setara (atau 4 cabang jika Departemen Kehakiman dilibatkan). Terlebih lagi, otoritas keamanan publik, yaitu polisi, dapat memberikan pengaruh dalam sistem hukum, yang berkontribusi pada dominasi dan supremasi polisi sebagai cabang eksekutif dalam penyelidikan tindak pidana dan jaminan sosial. Misalnya, sekretaris Komite Politik-Hukum partai di tingkat lokal, sering bertindak sebagai kepala polisi.⁵⁸ Harus ditekankan bahwa pengadilan di bawah Mao terutama adalah pengadilan pidana dan menangani sangat sedikit kasus perdata. Fungsi inti pengadilan menurut Fu, adalah untuk menghukum kalangan yang kontra-revolusioner.⁵⁹ Partai memiliki pendekatan langsung terhadap kasus-kasus kriminal dan pengadilan pidana, dan memulai beberapa kampanye yang bertujuan untuk menekan kaum kontra-revolusioner. Selama beberapa kampanye ini, Mao sendiri akan menyatakan berapa banyak penjahat yang harus diberikan hukuman mati di berbagai kota, dan dilaporkan ada kompetisi di antara berbagai pengadilan untuk mencapai jumlah terbesar penjatuhan pidana mati itu.

Kongres Rakyat, bersama dengan komite tetap, secara teratur menunjuk dan

memberhentikan para hakim. Selain itu, ketua pengadilan akan secara teratur melapor ke Kongres dan harus bersedia melakukan dengar pendapat. Meskipun Mahkamah Agung kadang-kadang dapat membuat hukum melalui penafsiran dalam pengujian undang-undang, akan tetapi Mahkamah tidak memiliki kekuasaan menguji peraturan daerah.⁶⁰ Dapat dikatakan bahwa pengadilan harus mematuhi prinsip supremasi legislatif, baik secara teori maupun dalam desain kelembagaan.⁶¹ Oleh karena itu, ketentuan tegas dirumuskan sehingga pengadilan tidak dapat melakukan uji materi terhadap keputusan pemerintahan dan atau perbuatan pemerintahan. Meskipun Mahkamah Agung dapat memberikan penafsirannya tentang norma-norma hukum, penafsiran seperti itu terbatas pada bidang yang berkaitan dengan putusan pengadilan, dan tidak ada alasan untuk menguji melalui penafsiran Konstitusi.⁶²

Pengekangan realitas politik juga menghambat profesional hukum, terutama peran positif pengacara. Dalam komunitas profesional hukum, diantara hakim, penuntut umum, dan pengacara, maka pengacara jauh lebih dekat dengan warga negara, pasar, dan masyarakat.⁶³ Baik dalam perkembangan

58 Guangjian Tu, "The Hague Choice of Court Convention: A Chinese Perspective," *The American Journal of Comparative Law* Vol.55, no. 2, (2007): 347–65.

59 H. Fu, "Access to Justice in China: Potentials, Limits, and Alternatives," dalam *China and Vietnam Compared: Law Reform in Communist Asia*, ed. oleh J. Gillespie dan A. Chen (London: Routledge, 2010).

60 Shaohua Lei, "Contentious Politics And Political Stability In Contemporary China: An Institutional Explanation" (dissertation Departmen of Politics The University of Utah, 2013).

61 Pierre F. Landry, "Does the Communist Party Help Strengthen China's Legal Reforms?," *China Review* Vol. 9, no. 1, (2009): 45–71.

62 Michael Asimow, "Five Models of Administrative Adjudication," *The American Journal of Comparative Law* Vol. 63, No. 1, (2015).

63 Lingyun Gao, "What Makes A Lawyer In China? The Chinese Legal Education System After China's Entry Into The Wto," *Willamette Journal of International Law and Dispute Resolution* Vol. 10, No. 1, (2002): 197–237.

ekonomi yang harmonis, perlindungan kepentingan individu, atau koordinasi hirarki tata urutan peraturan perundang-undangan, pengacara memainkan peran mediasi yang penting.⁶⁴ Namun, struktur profesional hukum China unik jika dibandingkan dengan struktur profesional hukum di negara lain.⁶⁵ Dalam struktur profesional, pengacara hanya meliputi 20% dari keseluruhan komunitas professional tersebut. Pada tahun 2000, rasio hakim dibandingkan pengacara adalah 2,5: 1, relatif rendah dibandingkan negara lain (1: 3 di Korea Selatan, 1: 3 di Perancis, 1: 6 di Jepang, dan 1:25 di Amerika Serikat).⁶⁶

Pada berbagai kesempatan, hakim akan membuat keputusan dengan mempertimbangkan keadaan yang berubah, melihat kepentingan publik, atau menghadirkan satu atau lebih solusi penyelesaian dengan ruang negosiasi dan kompromi timbal balik.⁶⁷ Bagi para hakim China, hak-hak individu tidak dapat sepenuhnya independen dan karenanya mereka tidak dapat bertindak atas dasar ketentuan normatif. Sebaliknya, utilitarianisme merelatifkan hak-hak individu dengan mengukur keuntungan dan kerugian bagi masyarakat; sama halnya, ia merelatifkan ketentuan hukum dalam situasi tertentu.⁶⁸

Ketika *rule of law* normatif dinisbikan, maka hanya peningkatan dalam kognisi fakta yang dapat menggantikan kekurangan dalam penilaian sebuah perkara. Fakta-fakta merelatifkan norma-norma, sementara norma-norma itu sendiri semakin bergantung pada fakta-fakta demi legitimasi mereka. Inilah paradoks hubungan antara fakta dan norma. Dalam keadaan seperti ini, tidak mengherankan bahwa modernisasi peradilan di China, terutama regularisasi penjaminan keadilan, telah mempersempit efisiensi dan teknik-teknik dalam rangka verifikasi fakta, bersamaan dengan penguatan terus menerus dari sistem inkuisisi. Tidak mengherankan bahwa, di China, ketika harus melakukan modernisasi hukum dan adjudikasi, menuju penguatan elemen inkuisisi. Hubungan saling memfasilitasi antara modernisasi dan profesionalisasi menjadi ilustrasi lingkaran setan reformasi peradilan saat ini di China.⁶⁹

Dalam praktiknya, kebijakan peradilan telah menyebabkan masalah. Orang-orang yang berselisih didorong mengajukan perkara kepada pengadilan, tetapi hakim hanya memiliki teknik mediasi yang sudah ketinggalan zaman. Faktanya, pengadilan tidak mungkin memuaskan semua orang;

64 Ethan Michelson, "Dear Lawyer Bao: Everyday Problems, Legal Advice, and State Power in China," *Social Problems* Vol. 55, No. 1, (2008): 43–71.

65 Sida Liu, "Globalization as Boundary-Blurring: International and Local Law Firms in China's Corporate Law Market," *Law & Society Review* Vol. 42, No. 4, (2008): 771–804.

66 Carlos Wing-Hung LO dan Snape ED, "Lawyers in the People's Republic of China: A Study of Commitment and Professionalization," *The American Journal of Comparative Law* Vol. 53, No. 2, (2005): 433–55.

67 Yuhua Wang, "Court Funding and Judicial Corruption in China," *The China Journal* 69, (2013): 43–63.

68 Valerie Sartor, "China's Evolving Legal System," *American Journal of Chinese Studies* Vol. 16, No. 1, (2009): 67–69.

69 Björn Ahl dan Daniel Sprick, "Towards judicial transparency in China: The new public access database for court decisions," *China Information* Vol. 32, No. 1, (2018): 3–22.

setidaknya dalam sebagian besar kasus setengah dari pihak (pihak yang kalah) akan tidak puas dengan putusan yang tidak menguntungkan. Jika pengadilan mencoba untuk menyenangkan semua orang, sama saja membelenggu diri sendiri. Di China, paradoks ironis ini menjadi nyata: pengadilan berada di garis depan dalam menangani masalah sosial. Namun, dalam sorotan penuh publisitas, otoritas kehakiman terus menerus rapuh dan menjadi terpinggirkan.

Di China, ada dua aspek tambahan yang patut diperhatikan. *Pertama*, meskipun peradilan independen tidak hanya membatasi kekuasaan, tetapi juga membenarkan legitimasi kekuasaan, peradilan tetap dapat menghadapi konflik yang tidak menyenangkan jika fungsi peradilan bertabrakan dengan logika struktur kekuasaan politik. Struktur kekuatan politik saat ini belum mengalami perubahan substantif di China. Konflik kelembagaan hampir tidak terhindarkan karena batas independensi peradilan meluas. Oleh karena itu, beberapa orang berpendapat bahwa tidak ada reformasi peradilan yang nyata yang akan berhasil jika tidak ada perombakan struktur kekuasaan politik. *Kedua*, independensi peradilan juga memiliki prasyarat, yang paling mendasar di antaranya adalah bahwa para hakim dianggap sebagai kelompok elit dengan integritas, kebijaksanaan, dan tanggung jawab. Sayangnya, hakim China terlalu banyak jumlahnya dan kualitasnya terlalu buruk. Ini adalah tantangan yang berat. Selain itu, bagi

hakim di China, gagasan tentang keadilan prosedural adalah asing bagi banyak hakim. Dalam konteks ini, kredibilitas peradilan dan otoritas masih memiliki jalan yang berliku.

Dibandingkan dengan pergeseran kekuasaan politik secara struktural, reformasi peradilan relatif lebih sulit. Jika reformasi peradilan pasti gagal, bagaimana mungkin reformasi politik yang komprehensif berhasil? Diakui bahwa reformasi peradilan tunduk pada pengaturan kekuasaan secara keseluruhan, namun demikian, masih mungkin bahwa penggunaan reformasi peradilan, sebagai terobosan atau referensi, berpengaruh secara bertahap transformasi struktur kekuasaan politik jika konsekuen dengan *rule of law*.⁷⁰ Dalam “sistem demokrasi rakyat”, seperti yang diterapkan di China, ekonomi dengan kepemilikan publik pada intinya mendukung kepentingan mendasar sejumlah besar orang. Legitimasi partai berasal dari kemenangan dalam revolusi kelas dan diabadikan demikian dalam Konstitusi. Sistem Kongres Rakyat, yang menggabungkan kekuasaan legislatif dan terkait erat dengan kejaksaan dan pengadilan, meniadakan perlunya pemisahan kekuasaan. Konsep hukum sosialis tidak menuntut hakim yang independen tetapi pengawasan peradilan oleh Kongres Rakyat. Ini adalah manifestasi lain dari gagasan unifikasi kekuasaan negara, yang diklaim efektif dalam praktik.

Selain itu, lebih dari 6 (enam) dekade pemerintahan partai tunggal telah mengembangkan seperangkat metode aturan

70 Weidong, “The Judicial Reform in China: The Status Quo and Future Directions.”

yang dilembagakan. Dasar-dasar kelembagaan pemerintahan partai telah berevolusi selama sejarah RRC, dan harus diubah secara mendasar jika Konstitusi ingin dilaksanakan. Status bertahan yang telah mengakar di lembaga-lembaga yang ada menimbulkan hambatan yang sangat besar bagi setiap upaya reformasi yang mengancam mereka. Partai tidak hanya merasa nyaman dengan tatanan yang ada tetapi juga menganggapnya sah-sah saja. Sel-sel partai fokus terhadap hukum, kebijakan, dan pengambilan keputusan dalam badan-badan pemerintahan. Fungsi legislasi dan peradilan seringkali untuk mendukung keputusan yang telah dibuat oleh Parpol, dan bukan menjalankan keadilan secara independen.

Di satu sisi, partai mengambil peran paternalistik, berkewajiban memberikan dukungan kepada pengadilan untuk mendapatkan akses dana operasional dan sumber daya lainnya dan meminjam otoritas pengadilan yang diperlukan untuk memaksa kepatuhan dari lembaga yang biasanya di luar kewenangan pengadilan sendiri. Bersamaan itu, partai mampu mempertahankan otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan di daerah-daerah tertentu dan diprioritaskan, di

mana ia dapat menentukan hasil peradilan dengan cara yang sewenang-wenang untuk memajukan agenda dan sasaran politiknya melalui pendekatan makro maupun mikro.⁷¹

Pengacara dan Negara

Tak lama setelah Partai Komunis mengambilalih kekuasaan (1949), sistem hukum macet, sebab partai memusuhi hukum.⁷² Semua dengan dalih ajaran Konfusiisme⁷³, pengaruh ajaran Marxis, yang menganggap hukum sebagai “*a tool of the former ruling classes destined to wither away along with the state.*”⁷⁴ Pada tahun 1950-an, pemimpin komunis Mao Zedong memulai menggelorakan kebebasan berfikir dan pemerintah kemudian mulai merintis sistem hukum sosialis.⁷⁵ Tetapi rintisan itu dibekukan karena Mao berubah pikiran. Ketika Den Xiaoping mengambilalih kekuasaan pada akhir 1970-an, ia mulai memperbaiki sistem yang dirusak oleh Mao.⁷⁶ Deng menginisiasi Kebijakan Pintu Terbuka guna membawa China ke pasar internasional.⁷⁷ Juga ketika itu banyak undang-undang ditetapkan dan hukum kemudian didorong untuk mendukung kebijakan baru tersebut. Karena tradisi permusuhan terhadap hukum dan awal

71 Li, “The Chinese Communist Party and People’s Courts: Judicial Dependence in China.”

72 Melanne Andromecca Civic, “Comparative Analysis of International & Chinese Human Rights Law-Universality Versus Cultural Relativism,” *Buffalo Journal of International Law* Vol. 2, (1996): 304.

73 *Ibid.*, hlm. 245-246.

74 Joseph W. Dellapenna, “The Role of Legal Rhetoric in the Failure of Democratic Change in China,” *Buffalo Journal of International Law* Vol. 2, (1996): 236–37.

75 *Ibid.* hlm. 246.

76 *Ibid.*, hlm. 247.

77 Stephen L. Chan, “Differences Between British and Chinese View of Law Forebode Uncertainties For Hong Kong’s People After the 1997’s Transfer,” *UCLA Pacific Basin Law Journal* Vol. 15, (1996): 157.

kampanye politik yang berlangsung antara 1949-1979, hampir tak ada pengacara di China.⁷⁸ Meskipun sistem hukum dipulihkan sejak 1980, namun profesi pengacara tak pernah lepas dari kekangan negara.

Pada tahun 1979, fakultas hukum di universitas dan lembaga pendidikan profesional lain yang menawarkan pelatihan hukum dibuka kembali. Banyak orang yang memanfaatkan situasi ini untuk memperoleh keserjanaan formal untuk pertama kali. Kantor penasehat hukum juga kembali didirikan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Bahkan, penelitian dan publikasi hukum melalui jurnal nasional juga dirintis. Pada tahun 1980, keluar Undang-Undang Kepengacaraan yang mendefinisikan pengacara sebagai “pekerja negara.”⁷⁹ Pada tahun 1986, Perhimpunan Pengacara China dibentuk dan ujian profesi diperkenalkan.⁸⁰ Pada tahun 1988, untuk pertama kali sebuah firma hukum didirikan oleh 5 (lima) orang pengacara di Shanghai.⁸¹

Sebelum Undang-Undang Kepengacaraan ditetapkan pada 1996 untuk mengatur firma hukum swasta, semua firma harus memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman.

Undang-Undang yang baru ini mendefinisikan pengacara sebagai “*a legal practitioner who holds a certificate to practice law and who provides legal services to society.*”⁸² Pada tahun yang sama, kode etik profesi untuk pertama kali ditetapkan oleh perhimpunan profesi. Pada 1997, setahun setelah pengundangan Undang-Undang Kepengacaraan, terdapat 100 ribu pengacara dan 8.200 firma hukum di China.⁸³ Sampai 2007, terdapat sekira 118.000 pengacara di China, mencakup sekitar 0,8 bagi setiap 10 penduduk China. Selama masa krisis 2008-2009, tak ada penurunan berarti jumlah pengacara.⁸⁴

Seperti ditulis di atas, pada tahun 1979, Den Xioping mencoba meluncurkan program baru sistem hukum sosialis, maka sistem pendidikan hukum model Soviet yang eksis sejak 1950-an harus diubah. Namun, bahkan hingga pertengahan 1990-an, pendidikan hukum belum mendukung perubahan itu.⁸⁵ Sejak tahun 1986, ketika ujian profesi untuk pertama kali diperkenalkan, hingga pertengahan 1990-an, ada 175 sekolah hukum, 84 ribu pengacara, dan sekitar 25-30 ribu mahasiswa hukum. Namun para pengacara ketika itu tidak memiliki kapasitas yang baik

78 Victoria Slind-Flor, “China’s Riches Lure Lawyers,” *National Law Journal* Vol. 29, (1993): 23–24.

79 LO dan ED, “Lawyers in the People’s Republic of China: A Study of Commitment and Professionalization.”

80 Weng Li, “Philosophical Influences On Contemporary Chinese Law,” *Indiana International & Comparative Law Review* Vol. 6, No. 2, (1996): 328–36.

81 Yujie Gu, “Entering the Chinese Legal Market: A Guide For Lawyers Interested in Practicing Law in China,” *Drake Law Review* 48, (2000): 173–90.

82 LO dan ED, “Lawyers in the People’s Republic of China: A Study of Commitment and Professionalization.”

83 Cynthia Losure Babaran, “Inspiring Global Professionalism: Challenges and Opportunities For American Lawyer in China,” *Indiana Journal of Global Legal Studies* 73, (2005): 1247–59.

84 Jie Gao, “Comparison Between Chinese and American Lawyers: Educated and Admitted to Practice Differently in Different Legal Systems,” *Penn State International Law Review* Vol. 29, No. 1, (2010): 129–46.

85 *Ibid.*

mengingat ketimpangan pendidikan hukum yang ada, di mana kebanyakan mahasiswa hukum juga cenderung berfikir klasik tidak sesuai dengan pertumbuhan pasar ekonomi ketika itu. Para mahasiswa sekolah hukum pada waktu itu prihatin soal bertahan hidup dalam kondisi yang sedemikian menyedihkan dan memastikan mereka benar-benar dapat menghadiri setiap kelas. Profesor kadang-kadang gagal hadir di kelas karena mereka pergi ke pengadilan atau bertemu klien mereka. Profesor juga menjalani praktik hukum karena gaji sekolah hukum mereka tidak cukup untuk bertahan hidup. Meskipun situasinya telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sekolah hukum China masih tidak sebanding dengan sekolah hukum Amerika Serikat.⁸⁶

Di luar aparatur negara, profesi pengacara berdiri di antara warga negara dan kekuasaan negara. Beberapa pakar telah menganalisis hubungan antara pengacara dan negara dalam banyak hal. Michael, misalnya, konsep “keterikatan politik” untuk menggambarkan hubungan kelembagaan antara pengacara dan aparatur negara, terutama polisi, kebijakan, dan pengadilan.⁸⁷ Michael berargumen bahwa pengacara yang secara politis melekat pada profesional tak sulit dalam praktik mereka. Liu dan Halliday lebih lanjut berargumen bahwa keterikatan politis pengacara terkait dengan

liberalisme politik yaitu, nilai-nilai liberal terhadap perlindungan kebebasan hukum dasar, pertumbuhan masyarakat sipil, dan hambatan pada penyalahgunaan kekuasaan negara.⁸⁸

Untuk waktu yang lama, kemampuan profesi hukum untuk beroperasi rentan terhadap pelanggaran oleh sistem peradilan di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat akar rumput di “asosiasi pengacara” profesional. Setiap tahun cabang-cabang administrasi sistem peradilan melakukan evaluasi tahunan terhadap para pengacara dan firma hukum; kewajiban untuk masuk dalam organisasi profesi, yang diselenggarakan secara resmi adalah wajib, dan juga pembayaran biaya keanggotaan.

Pada tahun 1997, China mengadopsi Undang-Undang Pengacara. Pasal 45 undang-undang ini menyatakan bahwa pengacara dan firma hukum harus bergabung dengan asosiasi pengacara lokal; di mana masing-masing asosiasi ini adalah anggota dari Perhimpunan Pengacara China. Ketentuan ini tampaknya bertentangan dengan pasal 35 Konstitusi, yang memberi warga negara hak untuk kebebasan berserikat. Selain itu tidak sesuai dengan semangat atau prinsip peraturan untuk pendaftaran kelompok sosial, yang menyatakan bahwa “Kelompok sosial dapat dibentuk secara sukarela oleh warga negara.”

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Ethan Michelson, “Unhooking from the State: Chinese Lawyers in Transition” (Disertasi Department of Sociology, University of Chicago, 2003).

⁸⁸ Sida Liu dan Terence C. Halliday, “Recursivity in Legal Chance: Lawyers and Reforms of China’s Criminal Procedure Law,” *Law & Social Inquiry* Vol. 34, (2009): 911–50.

Pada Oktober 2015, lebih dari 50 pengacara di China menandatangani petisi yang menyerukan revisi UU Pengacara. Salah satunya, seorang pengacara bernama Wang Longde, ditolak menjalankan profesi setelah menarik diri dari asosiasi pengacara. Dua bulan kemudian, tanpa menerima balasan atau tindak lanjut atas permintaan tersebut, para pengacara mengirim surat langsung ke Kongres Rakyat Nasional menuntut revisi Pasal 45 dengan alasan tidak mematuhi Konstitusi. Pada bulan Desember 2015, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang semakin menancapkan kuku negara terhadap para pengacara.

Akses pengacara dengan klien sulit, terutama dalam kasus yang menyentuh hak asasi manusia. Ketika mereka berusaha bertemu dengan seorang terdakwa yang ditahan, mereka sering menghadapi penghalang atau alasan yang tidak perlu. Pada 11 Oktober 2014, pengacara Beijing Yu Wensheng pergi ke kantor polisi Fengtai untuk menemui kliennya yang ditahan secara kriminal, Zhang Zonggang. Karena dukungan vokalnya terhadap protes di Hong Kong, Zhang telah ditahan oleh otoritas setempat karena “memicu pertengkaran dan memprovokasi masalah.” Pada hari kunjungan Pengacara Yu, para petugas di kantor polisi menolak untuk mengizinkan pertemuan itu, melanggar hak-hak mengakses pengacara, dan hak Yu sendiri untuk melakukan pekerjaannya. Yu mengajukan pengaduan, tetapi pihak berwenang tidak pernah

menanggapi kasus ini; sebagai gantinya, Pengacara Yu sendiri ditahan pada 13 Oktober 2014, dan ditahan selama 99 hari. Selama penahanannya, ia dilaporkan mengalami interogasi yang berlangsung hingga 17 jam, dan menjadi sasaran penganiayaan fisik. Baik anggota keluarga maupun pengacaranya tidak menerima pemberitahuan resmi tentang penahanannya atau dapat menghubungi dia. Setelah dibebaskan dengan jaminan, polisi memperingatkannya untuk tidak berbicara tentang penahanannya, di bawah ancaman bahwa mereka dapat menahan lagi kapan saja.

Hambatan akses tersebut sangat menonjol dalam kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran terhadap anggota atau praktisi di gereja-gereja di China. Sebagai contoh, pengacara Zheng Xiang terus-menerus dicegah akses terhadap kliennya, seorang pendeta di sebuah gereja di provinsi Zhejiang. Pengacara Zhang Kai, yang terkenal karena membela hak-hak orang Kristen, ditahan di Wenzhou pada 25 Agustus 2015 bersama dengan dua asistennya. Pihak berwenang menuduh mereka mengganggu ketertiban umum dan “membocorkan rahasia negara kepada intelijen asing.” Zhang ditahan, dan pada akhir Januari 2016 menjalani tahanan rumah, sementara penerapan tuduhan kejahatan “membahayakan keamanan nasional” telah memungkinkan pihak berwenang untuk memblokir bentuk bantuan hukum dan serta memberikan informasi kepada pembela dan keluarga.

Ketika China terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia pada 2013, pemerintah berkomitmen untuk bekerja sama dengan Dewan. Namun, pada 14 September 2013, pembela hak asasi manusia Tiongkok Cao Shunli, yang sedang dalam perjalanan ke Jenewa untuk berpartisipasi dalam pelatihan dan advokasi, ditahan oleh polisi setempat di bandara Beijing. Dia ditahan tanpa tuduhan hingga 21 Oktober 2013, ketika pemerintah menangkapnya secara resmi dengan tuduhan menciptakan gangguan. Di penjara, Cao Shunli disiksa, jatuh sakit dan tidak diberi akses ke perawatan kesehatan yang memadai. Dia meninggal di rumah sakit militer pada 14 Maret 2014. Demikian pula, pembela hak asasi manusia Anhui Zhou Weilin berencana untuk datang ke Jenewa pada bulan September 2013 untuk pelatihan dan kehadiran di Dewan HAM PBB. Namun, dia ditahan. Dia tetap dalam tahanan tanpa tuduhan sampai Desember 2013, ketika dia dinyatakan bersalah karena “mengumpulkan orang banyak untuk mengganggu ketertiban umum” oleh pengadilan Kota Hefei dan dijatuhi hukuman 18 bulan penjara. Ia dibebaskan pada Februari 2015.

Bahkan mereka yang tidak ingin berpartisipasi di PBB, tetapi menghadiri kegiatan internasional misalnya, Hari Perempuan Internasional, telah menjadi sasaran. Pada tanggal 6 dan 7 Maret 2015,

lima aktivis feminis, Wu Rongrong, Li Tingting, Wang Man, Zheng Churan, dan Wei Tingting, ditahan oleh pihak berwenang karena mengorganisir tindakan untuk menentang pelecehan seksual pada Hari Perempuan Internasional, 8 Maret. Setelah penahanan lima minggu, dengan perawatan buruk, kelalaian medis dan pelecehan, kelima wanita itu dibebaskan dengan jaminan pada April 2015, setelah ditahan dengan tuduhan “memicu pertengkaran dan memprovokasi masalah”.

Hubungan antara pengacara dan Partai Komunis selalu sulit, terlepas dari perubahan status dan peran pengacara di Tiongkok sejak tahun 1949.⁸⁹ Komposisi hakim atau jaksa sebagai kader partai seluruhnya hanya kurang sepertiga jumlah pengacara dalam posisi yang sama, setelah privatisasi profesi ini dalam dekade 1990-an. Sebagai actor nonelit partai, pengacara sebagai profesi memiliki saluran partisipasi politik yang sangat terbatas karena hanya sedikit pengacara yang menjadi kader partai dan jarang mendapatkan posisi di birokrasi negara.⁹⁰ Walaupun beberapa hakim mulai direkrut dari kalangan pengacara, akan tetapi jumlah mereka yang bersedia menjadi aparat pengadilan masih sedikit. Kontrol partai terhadap pengacara nonkader semakin keras dibandingkan yang menjadi elit politik. Melalui biro hukum dan asosiasi pengacara di semua tingkatan administrasi, partai telah

89 *Ibid.*

90 Michelson & Liu (2010).

mulai mempengaruhi seluruh profesi hukum di tahun 2010-an⁹¹ dan memberi sanksi kepada para pengacara yang kritis terhadap penguasa.⁹²

Munculnya aktivisme pengacara pada awal abad kedua puluh satu menempatkan otoritas negara pada posisi yang lebih tinggi. Penekanan pemimpin partai dalam pemerintahan adalah pada tahun 2000 yang telah direfleksikan dalam peraturan pengacara. Sejak akhir 2000-an, Kementerian Kehakiman mulai mendorong firma hukum untuk mengundang struktur partai di dalam perusahaan. Dacheng, perusahaan hukum Tiongkok terbesar, bahkan membentuk komite partai, karena memiliki sejumlah besar anggota partai. Pengendalian pengacara aktivis pada bulan Juli 2015, di mana lebih dari 200 pengacara diperiksa sebelum ditata.

Namun, perubahan demografis pengacara membuat kontrol total negara-partai menjadi bermasalah. Pada tahun 2000, China memiliki sekitar 120.000 pengacara, dan jumlah total ini telah berlipat tiga menjadi sekitar 365.000 pengacara pada Maret 2018. Selama dekade terakhir, ada 20.000 hingga 30.000 pengacara baru bergabung dalam perhimpunan profesi setiap tahun, termasuk beberapa mantan hakim dan pengacara yang mengundurkan diri dari lembaga peradilan karena gaji rendah dan beban kerja yang berat. Meningkatnya jumlah pengacara dan arus profesional hukum

dari kejaksaan dan pengadilan ke pengadilan berpotensi menimbulkan tantangan bagi kontrol partai atas profesi hukum di masa depan. Di seluruh dunia, pengacara sering memainkan peran aktif dalam perubahan politik besar. Pengacara China belum menjadi kekuatan politik utama tetapi, selama mereka terus berkembang sebagai profesi di luar aparatur negara, mereka kemungkinan akan membentuk kembali kelompok sosial yang khawatir tidak hanya terhadap hakim korup, jaksa yang tidak kompeten, atau petugas polisi yang kejam, tetapi partai itu sendiri.

Penutup

Dalam tulisan ini, penulis telah menguraikan pendekatan relasional untuk mempelajari lembaga-lembaga politik hukum di China. Pendekatan relasional ini diperlukan oleh tatanan hubungan kekuasaan yang berkembang antara hukum dan politik China. *Pertama*, ide-ide panduan partai, dari waktu ke waktu, membatasi peran hukum sebagai salah satu dari beberapa prinsip tata kelola di bawah kepemimpinan Partai Komunis. Karena itu, diskusi tentang peran hukum China perlu ditempatkan dalam konteks hubungannya dengan prinsip-prinsip pemerintahan lain yang bersaing, seperti moralitas dan kehendak rakyat. *Kedua*, sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang berubah, telah terjadi pergeseran keseimbangan kekuasaan

91 Judith McMorro, Sida Liu, dan Benjamin Van Rooij, "Lawyer Discipline in an Authoritarian Regime: Empirical Insights from Zhejiang Province, China," *Georgetown Journal of Legal Ethics* 30, (2017): 267–300.

92 Hualing Fu, "The July 9th (709) Crackdown on Human Rights Lawyers: Legal Advocacy in an Authoritarian State," *Journal of Contemporary China* 27, (2018): 554–68.

antara hakim, polisi, dan jaksa. Interaksi di antara organisasi-organisasi ini lebih lanjut membentuk dinamika kekuatan masing-masing lembaga masing-masing. *Ketiga*, profesi pengacara, sebagai aktor kolektif yang didorong oleh etika profesional, persaingan pasar, dan kendala politik, telah secara simultan meningkatkan otonomi

mereka dari negara. *Keempat*, Partai telah memperkuat kontrolnya terhadap pengacara dalam beberapa tahun terakhir, terutama sebagai tanggapan atas maraknya aktivisme pengacara. Meskipun banyak kegiatan yang mencakup batas, lembaga dan aktor hukum di China tetap terikat oleh negara-partai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bourdieu, Pierre, dan Loïc Wacquant. *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1992.

Dean, Meryll. *Japanese Legal System: Text and Materials*. London: Cavendish Publishing, 1997.

Fu, H. "Access to Justice in China: Potentials, Limits, and Alternatives." Dalam *China and Vietnam Compared: Law Reform in Communist Asia*, disunting oleh J. Gillespie dan A. Chen. London: Routledge, 2010.

Juwana, Hikmahanto. "Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia." Yogyakarta, 2013.

Lan, R. "Are Intellectual Property Litigants Treated Fairer in China's Courts? An Empirical Study of Two Sample Courts?" India: Indiana University Research Center for Chinese Politics and Business, 2012.

Lieberthal, Kenneth, dan David M. Lampton. *Bureaucracy, Politics, and Decision Making in Post-Mao China*. Berkeley: University of California Press, 1992.

Manullang, E. Fernando. *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Kompas Gramedia Nusantara, 2007.

Xiao-Planes, Xiaohong. "Of Constitutions and Constitutionalism: Trying to Build a New Political Order in China, 1908-1949." Dalam *Building Constitutionalism in China*, disunting oleh Stéphanie Balme dan Michael W. Dowdle. New York: Palgrave Macmillan, 2009.

Jurnal

Ahl, Björn, dan Daniel Sprick. "Towards judicial transparency in China: The new public access database for court decisions." *China Information Vol. 32, No. 1*, (2018): 3–22.

- Asimow, Michael. "Five Models of Administrative Adjudication." *The American Journal of Comparative Law* Vol. 63, No. 1, (2015).
- Babaran, Cynthia Losure. "Inspiring Global Professionalism: Challenges and Opportunities For American Lawyer in China." *Indiana Journal of Global Legal Studies* Vol. 73, (2005): 1247–59.
- Bourdieu, Pierre. "The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field." *Hastings Law Journal* Vol. 38, (1987): 805–53.
- Brødsgaard, Kjeld Erik. "Politics and Business Group Formation in China: The Party in Control?" *The China Quarterly* 211, (2012): 624–48.
- Chan, Stephen L. "Diferences Between British and Chinese View of LawForebode Uncertainties For HongKong's People After the 1997's Transfer." *UCLA Pasific Basin Law Journal* 15, (1996): 157.
- Chunying, Xin. "What kind of judicial power does China need?" *International Journal of Constitutional Law* Vol.1, No. 1, (2003): 58–78.
- Civic, Melanne Andromecca. "Comparative Analysis of International & Chinese Human Rights Law-Universality Versus Cultural Relativism." *Buffalo Journal of International Law* 2, (1996): 304.
- Clarke, Donald C. "New Approaches to the Study of Political Order in China." *Modern China* Vol. 36, No. 1, (2010): 87–99.
- Dellapenna, Joseph W. "he Role of Legal Rhetoric in the Failure of Democratic Change in China." *Buffalo Journal of International Law* 2, (1996): 236–37.
- Donaldson, John A. "China's administrative hierarchy: The balance of power and winners and losers within China's levelsof government." Dalam *Assessing the balance of power in central-local relations in China*, disunting oleh John A. Donaldson. Abingdon: Routledge, 2017.
- Emirbayer, Mustafa. "Manifesto for a Relational Sociology." *American Journal of Sociology* 103, (1997): 281–317.
- Finder, S. "Supreme People's Court of the People's Republic of China." *Chinese Journal of International Law* 7, (1993): 145–224.
- Fu, Hualing. "The July 9th (709) Crackdown on Human Rights Lawyers: Legal Advocacy in an Authoritarian State." *Journal of Contemporary China* 27, (2018): 554–68.
- Gao, Jie. "Comparison Between Chinese and American Lawyers: Educated and Admitted to Practice Differently in Different Legal Systems." *Penn State International Law Review* Vol. 29, no. 1, (2010): 129–46.
- Gao, Lingyun. "What Makes A Lawyer In China? The Chinese Legal Education

- System After China's Entry Into The Wto." *Willamette Journal of International Law and Dispute Resolution* Vol. 10, no. 1, (2002): 197–237.
- Grimheden, J. "Themis V. Xiezhi: Assessing Judicial Independence in the People's Republic of China Under International Human Rights Law.," 2004.
- Gu, Weixia. "Judicial Review over Arbitration in China: Assessing the Extent of the Latest Pro-Arbitration Move by the Supreme People's Court in the People's Republic of China." *Wisconsin International Law Journal* Vol. 27, no. 2, (2009): 221.
- Gu, Yujie. "Entering the Chinese Legal Market: A Guide For Lawyers Interested in Practicing Law in China." *Drake Law Review* 48, (2000): 173–90.
- Hajiji, Merdi. "Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 2, No. 3, (2013): 361–73.
- He, Xin. "Why Did They Not Take the Disputes? Law, Power, Politics in the Decision-Making of Chinese Courts." *International Journal of Law in Context* 3, (2007): 203.
- Howson, Nicholas C. "China's Judicial System and Judicial Reform." *The Law Quadrangle* Vol. 54, no. 1, (2011): 62–64.
- Huang, Philip C. C. "Court Mediation in China, Past and Present." *Modern China* Vol. 32, No. 3, (2006): 275–314.
- Ip, Eric C. "Judicial Review in China: A Positive Political Economy Analysis." *Review of Law & Economics* Vol. 8, No. 2, (2012): 331–66.
- Katz, Paul R. "Ritual? What Ritual? Secularization in the Study of Chinese Legal History, from Colonial Encounters to Modern Scholarship." *Social Compass* Vol. 56, No. 3, (2009): 328–44.
- Kawagishi, Norikazu. "The birth of judicial review in Japan." *International Journal of Constitutional Law* Vol. 5, No. 2, (2007): 308–331.
- Keyuan, Zou. "Judicial Reform in China: Recent Developments and Future Prospects." *The International Lawyer* Vol. 36, No. 3, (2002): 1039–62.
- Landry, Pierre F. "Does the Communist Party Help Strengthen China's Legal Reforms?" *China Review* 9, no. 1 (2009): 45–71.
- Latif, Abdul, dan Hasbi Ali. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Lei, Shaohua. "Contentious Politics And Political Stability In Contemporary China: An Institutional Explanation." Dissertation Departmen of Politics The University of Utah, 2013.
- Li, Cheng. "The Chinese Communist Party: Recruiting and Controlling the New Elites." *Journal of Current Chinese Affairs* Vol. 38, no. 3, (2009): 13–33.
- Li, Li Ying, dan Yue Ma. "Adjudication and Legal Reforms in Contemporary

- China.” *Contemporary Criminal Justice* Vol.25, no. 1, (2010): 36–52.
- Li, Ling. “The Chinese Communist Party and People’s Courts: Judicial Dependence in China.” *The American Journal Of Comparative Law* 64, (2016): 36–74.
- Li, Weng. “Philosophical Influences On Contemporary Chinese Law.” *Indiana International & Comparative Law Review* Vol. 6, No. 2, (1996): 328–36.
- Lidong, Cai, dan Qi Yingcheng. “Judicial Governance of ‘Fake Divorce’ with Chinese Characteristics: Practical Rationality of the Chinese Courts in the Transitional Period.” *China Review* Vol. 19, No. 2, (2019): 99–124.
- Liebman, Benjamin L. “China’s Courts: Restricted Reform.” *The China Quarterly* no. 191, (2007): 620–38.
- Liu, Sida. “Globalization as Boundary-Blurring: International and Local Law Firms in China’s Corporate Law Market.” *Law & Society Review* Vol. 42, No. 4, (2008): 771–804.
- Liu, Sida, dan Terence C. Halliday. “Recursivity in Legal Chance: Lawyers and Reforms of China’s Criminal Procedure Law.” *Law & Social Inquiry* 34, (2009): 911–50.
- Liu, Sida, dan Hongqi Wu. “The Ecology of Organizational Growth: Chinese Law Firms in the Age of Globalization.” *American Journal of Sociology* 122, (2016): 798–837.
- LO, Carlos Wing-Hung, dan Snape ED. “Lawyers in the People’s Republic of China: A Study of Commitment and Professionalization.” *The American Journal of Comparative Law* Vol. 53, No. 2, (2005): 433–55.
- Lubman, Stanley. “Looking for Law in China.” *Columbia Journal of Asian Law* Vol. 20, No. 1, (2006): 1–92.
- McMorrow, Judith, Sida Liu, dan Benjamin Van Rooij. “Lawyer Discipline in an Authoritarian Regime: Empirical Insights from Zhejiang Province, China.” *Georgetown Journal of Legal Ethics* 30, (2017): 267–300.
- Meyer, Marshall W. “The Growth of Public and Private Bureaucracies.” *Theory and Society* 16, (1987): 215–35.
- Michelson, Ethan. “Dear Lawyer Bao: Everyday Problems, Legal Advice, and State Power in China.” *Social Problems* Vol. 55, No. 1, (2008): 43–71.
- Morris, Robert J. “China’s Marbury: Qi Yuling v. Chen Xiaoqi-The Once and Future Trial of Both Education & Constitutionalization.” *Tsinghua China Law Review* 2, no. 2, (2010): 274–312.
- Pieke, Frank N. “The Communist Party and Social Management in China.” *China Information* Vol. 26, No. 2, (2012): 149–65.
- Qianfan, Zhang. “A Constitution without Constitutionalism? The Paths of Constitutional Developments in China.” *International Journal of Constitutional Law* Vol. 8, No. 4, (2010): 950–76.

- Salam, Abdus. "Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia." *Mazahib Vol. 15, No. 2*, (2015): 120–31.
- Sartor, Valerie. "China's Evolving Legal System." *American Journal of Chinese Studies Vol. 16, No. 1*, (2009): 67–69.
- Slind-Flor, Victoria. "China's Riches Lure Lawyers." *National Law Journal 29*, (1993): 23–24.
- Tang, Yingmao, dan John Zhuang Liu. "Mass Publicity of Chinese Court Decisions: Market-Driven or Authoritarian Transparency?" *China Review Vol. 19, No. 2*, (2019): 15–40.
- Thornton, John L. "Long Time Coming: The Prospects for Democracy in China." *Foreign Affairs Vol. 87, No. 1*, (2008): 2–22.
- Travekas, Susan. "Severe and Swift Justice in China." *British Journal of Criminology 34*, (2006): 23–41.
- Trevaskes, Susan. "Political Ideology, the Party, and Politicking: Justice System Reform in China." *Modern China Vol. 37, No. 3*, (2011): 315–44.
- . "Propagating Justice through Court and Prosecution Work in China." *Modern China Vol. 43, No. 2*, (2017): 156–185.
- . "The Supreme People's Court, the Suspended Death Sentence and the Politics of Penal Reform." *The British Journal of Criminology Vol. 53, No. 3*, (2013): 482–99.
- Tu, Guangjian. "The Hague Choice of Court Convention: A Chinese Perspective." *The American Journal of Comparative Law Vol. 55, No. 2*, (2007): 347–65.
- Wang, Juan, dan Sida Liu. "Ordering Power under the Party: A Relational Approach to Law and Politics in China." *Asian Journal of Law and Society 6*, (2019): 1–18.
- Wang, Yuhua. "Court Funding and Judicial Corruption in China." *The China Journal 69*, (2013): 43–63.
- Wang, Zhuhao, dan David R. A. Caruso. "Is an Oral-Evidence Based Criminal Trial Possible in China?" *The International Journal of Evidence & Proof Vol. 21, No. 1–2*, (2017): 52–68.
- Weidong, Ji. "The Judicial Reform in China: The Status Quo and Future Directions." *Indiana Journal of Global Legal Studies Vol. 20, No. 1*, (2013): 185–220.
- Xu, Xiaoqun. *Trial of Modernity: Judicial Reform in Early Twentieth-Century China, 1901-1937*. Stanford, CA: Stanford University Press, 2008.
- Zhang, Taisu. "The Pragmatic Court: Reinterpreting the Superme People's Court of China." *Columbia Journal of Asian Law 25* (2012): 1–61.
- Zheng Sophia, Tang. "Effectiveness Of Exclusive Jurisdiction Clauses In The Chinese Courts—A Pragmatic Study." *The International and Comparative Law Quarterly Vol. 61, No. 2*, (2012): 459–84.

Zhong, J., dan G. Yu. "Establishing the Truth on Facts: Has the Chinese Civil Process Achieved This Goal." *Journal of Transnational Law & Policy* 13, No. 2, (2004): 393–446.

Disertasi

Michelson, Ethan. "Unhooking from the State: Chinese Lawyers in Transition." Disertasi Department of Sociology, University of Chicago, 2003.